

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan. Diperlukannya anggaran pembangunan yang tidak sedikit. Ada beberapa sumber dana yang bisa digunakan untuk memenuhi anggaran tersebut, salah satunya adalah dari sektor pajak. Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Thomas Sumarsan (2017) “ Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan timbal yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Di Indonesia, pajak memenuhi 70% penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dapat diartikan bahwa pajak menduduki posisi yang lebih besar dalam meningkatkan pendapatan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan lain (non pajak).

Penerimaan pajak dalam waktu 10 tahun terakhir tidak pernah mencapai target, kecuali pada tahun 2008. Sebab tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan adanya *Sunset Policy*. Pada tahun 2015 realisasi pajak hanya mencapai 81,5%. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, dibutuhkan upaya nyata serta diterapkannya dalam bentuk kebijakan pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ialah Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).

Tax Amnesty merupakan kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016. Dikeluarkannya kebijakan ini dilatar belakangi karena banyak harta wajib pajak yang berada dalam negeri maupun luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Pemerintah berharap pengampunan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar,

dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara setelah diberlakukannya program ini.

Kebijakan Tax Amnesty pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1984, pelaksanaan Tax Amnesty tahun 1984 tidak efektif karena kurangnya respon dari wajib pajak dan tidak diikuti dengan perubahan sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Karena pada saat itu peran pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap, sehingga pemerintah tidak mengupayakan dengan maksimal. Masa itu penerimaan negara banyak bersumber dari sektor ekspor minyak dan gas bumi. Berbeda dengan tax amnesty sebelumnya, tax amnesty tahun 2016 ini, lebih baik karena telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Direktorat Jendral Pajak menetapkan pengenaan tarif bagi harta yang belum dilaporkan wajib pajak kedalam tiga periode.

Berdasarkan pengalaman penulis dalam PKL di Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry Semarang terdapat klien wajib pajak yang memanfaatkan program pengampunan pajak / tax amnesty ini untuk mendapatkan pengampunan pajak terhadap harta yang belum di laporkan maupun untuk menghindari sanksi denda administrasi maupun pemeriksaan. Dengan menggunakan study kasus pada wajib pajak PT. BNM yang menjadi salah satu wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak, penulis tertarik untuk membahastugas akhir mengenai keikutsertaan wajib pajak PT. BNM dalam mengikuti program pengampunan pajak.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat di ambil judul “**Penerapan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) terhadap PT. BNM “.**

1.2. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membahas pokok – pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu,

penulisan Tugas Akhir ini menjadi lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan mengenai peneran kebijakan pengampunan pajak PT. BNM.

Berdasarkan judul tersebut, maka ruang lingkup pembahasan masalah dapat merumuskan secara garis besar dalam beberapa bagian meliputi :

1. Kondisi apa yang melatar belakangi PT. BNM dalam mengikuti *Tax Amnesty*?
2. Bagaimana pelaksanaan *Tax Amnesty* yang dilakukan PT.BNM ?
3. Bagaimana penghitungan uang tebusan *Tax Amnesty* pada PT. BNM?
4. Apa manfaat bagi PT. BNM mengikuti *Tax Amnesty*?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan untuk mengetahui upaya PT. BNM dalam mengikuti *Tax Amnesty* yang dilakukan berdasarkan Undang – Undang yang berlaku.

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Mengetahui apa saja yang melatar belakangi keikutsertaan PT. BNM dalam mengikuti *Tax Amnesty*
2. Mengetahui bagaimana pelaksanaan *Tax Amnesty* pada PT.BNM
3. Mengetahui bagaimana penghitungan uang tebusan *Tax Amnesty* PT. BNM
4. Mengetahui manfaat mengikuti program *Tax Amnesty* bagi PT. BNM

1.3.2 Kegunaan Penlisan

Dari hasil Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, antara lain :

a. Bagi Mahasiswa

Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma III Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

b. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai tambahan informasi maupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil Tugas Akhir ini.

c. Bagi Perusahaan.

Sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masyarakat yang akan datang.

1.4. Cara Pengumpulan Data

1.4.1 Data Penelitian

Metode Pengumpulan Data merupakan metodologi yang membicarakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner, observasi biasa, kombinasi atau metode lain.

Dalam penyusunan Tugas Akhir, data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dibahas, artinya data tersebut harus berkaitan, mengena dan tepat. Berdasarkan sumber data yang di gunakan dalam laporan Tugas Akhir adalah

a. Data Primer

Menurut Santosa (2007:12), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu lembaga itu sendiri. Data primer yang diperoleh peneliti berasal langsung dari objeknya yang merupakan himpunan kenyataan-kenyataan yang mengandung sesuatu keterangan yang pokok, yang pertama, yang dapat dijadikan dasar untuk membuat sesuatu keputusan atau menyusun kesimpulan.

b. Data Sekunder

Menurut Santosa (2007:13), data sekunder adalah data eksternal dalam berbagai bentuk yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya dan berasal dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis.

Data tersebut dapat diperoleh melalui studi pustaka dengan cara mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan sebagai perbandingan antara data yang ada.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam pembuatan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode guna pengumpulan data, metode tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan. Karena observasi tidak selalu dengan obyek manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi, dalam Sugiyono (2012:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dengan menggunakan metode ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hishibullah & Jerry Semarang secara sistematis bagaimana proses dalam menangani masalah perpajakan .

b. Metode Wawancara

Yaitu suatu cara mengumpulkan data untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden melalui daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis,. Wawancara merupakan teknik yang paling banyak dilakukan karena memperoleh dan mempercepat pemindahan informasi. Selain itu dengan wawancara permasalahan lebih cepat ditemukan.

Metode ini digunakan penulis dengan cara mewawancarai beberapa narasumber yang langsung bekerja mengurus Tax Amnesty untuk

memperoleh data-data yang di perlukan dalam mengikuti Tax Amnesty oleh klien Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbibullah & Jerry Semarang.

c. Metode Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari, serta mengadakan penelitian melalui kepustakaan. Obyeknya adalah buku-buku yang bersangkutan dengan pokok bahasan yang diteliti.

Dalam studi pustaka ini penulis memperoleh data-data penyelesaian masalah dan referensi dari Tugas Akhir terdahulu dan mencatat dari buku referensi yang berhubungan dengan penulisan laporan Tugas Akhir serta mencatat dari arsip-arsip lainnya yang diperlukan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman terhadap laporan yang akan dibahas. Penulisan Tugas Akhir ini disusun menjadi empat bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul , ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan sistematika pengumpulan data dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi tentang gambaran secara umum Perusahaan meliputi beberapa hal yang melatar belakangi sejarah berdirinya PT.BNM, dasar pembentukan PT. BNM, visi dan misi berdirinya PT. BNM, deskripsi kerja, serta gambaran struktur organisasi PT. BNM

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang uraian gambaran perpajakan secara umum, yang meliputi deskripsi pengertian pajak, pengertian *Tax Amnesty*, Penghitungan uang tebusan PT. BNM, permasalahan dalam pembayaran *Tax Amnesty*, dan Manfaat PT. BNM mengikuti *Tax Amnesty*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan.